BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.[[1]](#footnote-1) Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk, yang secara terus menerus akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur.[[2]](#footnote-2)

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat, dan menjadi isu yang sangat mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol.

Jika dilihat dari segi pembangunan, maka jumlah penduduk sangat berpengaruh dengan masalah pembangunan suatu wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Semakin lengkap data kependudukan yang tersedia maka semakin mudah rencana pembangunan di susun. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu di sebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari definisi tersebut diharapkan adanya keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk sehingga kehidupan masyarakat dapat terkendali dan seimbang.

Salah satu akibat dari meningkatnya jumlah penduduk adalah pemukiman warga, Pertumbuhan penduduk menaikkan kebutuhan rumah. Apabila pertumbuhan konstruksi rumah dan perluasan fasilitas publik tidak mampu mengikuti peningkatan kebutuhan rumah tersebut, akibat yang kemudian timbul adalah meningkatnya kepadatan rumah dan menurunnya kualitas rumah dari waktu ke waktu. Gejala demikian inilah yang terjadi di kebanyakan negara-negara sedang berkembang saat ini.[[3]](#footnote-3) Masalah pemukiman terutama dirasakan di perkotaan, Salah satu penyebabnya adalah urbanisasi. Urbanisasi di negara-negara berkembang muncul lebih banyak karena tekanan hidup di desa dan industrialisasi di kota. Kota yang sesungguhnya tidak menjanjikan banyak kesempatan kerja, terutama kepada urbanis yang miskin pendidikan dan keterampilan, tetap saja dibanjiri penduduk. Arus urbanisasi yang tinggi ini juga memacu naiknya harga tanah dan rumah di kota, sehingga akses kaum urbanis, terutama yang miskin, untuk memiliki atau menyewa rumah yang layak huni dan dilengkapi sanitasi yang memadai menjadi semakin rendah.[[4]](#footnote-4) Karena akses kepada pekerjaan lebih banyak terdapat dipusat-pusat kota, dan transportasi sering merupakan kendala, para urbanis miskin ini lebih suka berdesakan di tengah kota daripada menempati daerah pinggiran kota. Akibat dari itu adalah menjamurnya pemukiman kumuh dan liar dengan sanitasiyang sangat terbatas.[[5]](#footnote-5)

Kota Jambi yang merupakan barometer pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data BKKBN angka pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi terus meningkat atau berada di atas rata-rata nasional yaitu 2,3 persen sementara di tingkat nasional sendiri hanya berada pada 2.0 persen.[[6]](#footnote-6) Data ini sungguhlah cukup mengkhawatirkan karena telah melewati angka rata-rata nasional. Untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka cara yang paling tepat adalah menurunkan tingkat kelahiran khususnya di Kota Jambi yang merupakan barometer pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jambi tahun 2011 jumlah penduduk Kota Jambi sebanyak 540.258 jiwa, tahun 2012 naik menjadi 560.216 jiwa, untuk tahun 2013 naik menjadi 560.216 jiwa tahun 2014 naik menjadi 568.062 jiwa tahun 2015 naik menjadi 576.067 jiwa, tahun 2016 naik menjadi 583.487 jiwa, tahun 2017 naik menjadi 591.134 jiwa dan tahun 2018 naik menjadi 598.103 jiwa atau dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, rata rata kenaikan penduduk adalah sebesar 8.952 jiwa atau 1,63% setiap tahunnya.[[7]](#footnote-7) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Ket |
| 1 | 2011 | 543.193 | BPS Kota Jambi |
| 2 | 2012 | 551.714 | BPS Kota Jambi |
| 3 | 2013 | 560.188 | BPS Kota Jambi |
| 4 | 2014 | 568.062 | BPS Kota Jambi |
| 5 | 2015 | 576.067 | BPS Kota Jambi |
| 6 | 2016 | 583.487 | BPS Kota Jambi |
| 7 | 2017 | 591.134 | BPS Kota Jambi |
| 8 | 2018 | 598.103 | BPS Kota Jambi |

Sumber Data: BPS Kota Jambi

Semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk tentu pemerintah tidak akan tinggal diam, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada konstitusi sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, dimana presiden pemegang kekuasaan pemerintahan negara sedangkan Gubernur dan Bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah:[[8]](#footnote-8)

Sebagaimana Dasril Radjab mengatakan bahwa:

Dengan sistem desentralisasi (otonomi), maka wilayah republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah otonom. Daerah otonom masing-masing memiliki otonomi daerah , yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[9]](#footnote-9)

Maka berdasarakan sistem Desentralisasi ini tentu permasalahan pengendalian penduduk di Kota Jambi telah menjadi wewenang pemerintah daerah Kota Jambi.

Berbagai upaya tentunya telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Jambi dalam upaya pengendalian penduduk di Kota Jambi. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah serta Peraturan Daerah Kota jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang salah satu isinya adalah pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan yang tugas pokok dan fungsinya di atur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi pada Pasal 3 ayat (3) yaitu sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berncana;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dan pengendalian kuantitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan analisis dampak kependudukan;
6. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga lini lapangan;
8. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
9. pelaksanaan pelayanan KB;
10. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB;
11. pembinaan ketahanan dan kesejahtraan keluarga;
12. pelaksanaan pendidikan kependudukan;
13. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
14. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dibentuk susunan organisasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

1. kepala dinas;
2. sekretariat, terdiri dari:
3. sub bagian perencanaan;
4. sub bagian umum dan kepegawaian;
5. sub bagian keuangan dan aset.
6. bidang advokasi penggerakan dan informasi, terdiri dari:
7. seksi komunikasi informasi dan edukasi;
8. seksi advokasi binas hubungan antar lembaga;
9. seksi bina lini lapangan.
10. bidang pembinaan keluarga berencana, terdiri dari:
11. seksi pengendalian dan pendistribusian alokon;
12. seksi jaminan pelayanan KB;
13. seksi bina kesertaan KB.
14. bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, terdiri dari:
15. seksi pemberdayaan ekonomi keluarga;
16. seksi bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
17. seksi bina ketahanan remaja.
18. bidang pengendalian penduduk, terdiri dari:
19. seksi analisis parameter kependudukan;
20. seksi kerjasama pendidikan kependudukan;
21. seksi dampak kependudukan.
22. unit pelaksanaan teknis dinas;
23. kelompok jabatan fungsional.

Untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka cara yang paling tepat adalah menurunkan tingkat kelahiran. Salah satu kebijakan dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk sendiri adalah kebijakan keluarga berencana. Di Kota Jambi peserta KB aktif telah menigkat mulai dari tahun 2018 berjumlah 72.548 peserta, pada tahun 2019 berjumlah 72.736 peserta dan pada tahun 2020 berjumlah 65.199 peserta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabe ldibawah ini:

**Tabel 1**

Pencapaian Peserta KB Aktif

Per Kecamatan Dalam Kota Jambi

Bulan: Desember 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | MIX KONTRASEPSI | | | | | | | JUMLAH |
| IUD | MOW | MOP | KDM | IMPL | SKB | PKB |
| 1 | TELANAIPURA | 913 | 143 | 20 | 250 | 404 | 3.528 | 959 | 6.217 |
| 2 | JAMBI SELATAN | 481 | 192 | 7 | 1.026 | 315 | 1.938 | 3.282 | 7.241 |
| 3 | JAMBI TIMUR | 426 | 246 | 4 | 196 | 302 | 3.773 | 1.926 | 6.873 |
| 4 | PASAR JAMBI | 176 | 79 | - | 82 | 118 | 865 | 465 | 1.785 |
| 5 | PELAYANGAN | 65 | 2 | 16 | 176 | 679 | 788 | 703 | 2.429 |
| 6 | DANAU TELUK | 61 | 27 | 4 | 29 | 39 | 1.171 | 360 | 1.691 |
| 7 | KOTA BARU | 929 | 242 | 15 | 389 | 514 | 3.650 | 3.475 | 9.214 |
| 8 | JELUTUNG | 512 | 412 | 3 | 271 | 331 | 3.443 | 2.246 | 7.218 |
| 9 | ALAM BARAJO | 1.241 | 400 | 24 | 499 | 598 | 4.154 | 4.936 | 11.852 |
| 10 | DANAU SIPIN | 502 | 103 | 9 | 104 | 226 | 3.096 | 1.268 | 5.308 |
| 11 | PAAL MERAH | 678 | 158 | 30 | 310 | 1.023 | 6.473 | 4.048 | 12.720 |
| KOTA JAMBI  JUMLAH | | 5.984 | 2.004 | 132 | 3.332 | 4.549 | 32.879 | 23.668 | 72.548 |

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

**Tabel 2**

Pencapaian Peserta KB Aktif

Per Kecamatan Dalam Kota Jambi

Bulan: Desember 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | MIX KONTRASEPSI | | | | | | | JUMLAH |
| IUD | MOW | MOP | KDM | IMPL | SKB | PKB |
| 1 | TELANAIPURA | 934 | 144 | 20 | 271 | 417 | 3.552 | 898 | 6.236 |
| 2 | JAMBI SELATAN | 463 | 172 | 13 | 481 | 393 | 3.304 | 1.961 | 6.787 |
| 3 | JAMBI TIMUR | 455 | 268 | 4 | 244 | 332 | 3.925 | 1.992 | 7.220 |
| 4 | PASAR JAMBI | 186 | 85 | - | 86 | 121 | 887 | 772 | 2.137 |
| 5 | PELAYANGAN | 55 | 2 | 16 | 176 | 681 | 801 | 715 | 2.446 |
| 6 | DANAU TELUK | 65 | 27 | 4 | 39 | 41 | 1.194 | 386 | 1.756 |
| 7 | KOTA BARU | 959 | 248 | 5 | 417 | 549 | 3.714 | 3.521 | 9.413 |
| 8 | JELUTUNG | 512 | 425 | 3 | 268 | 327 | 3.447 | 2.253 | 7.235 |
| 9 | ALAM BARAJO | 1.324 | 418 | 28 | 514 | 658 | 4.286 | 4.983 | 12.211 |
| 10 | DANAU SIPIN | 364 | 91 | 15 | 111 | 197 | 3.087 | 1074 | 4.939 |
| 11 | PAAL MERAH | 678 | 165 | 30 | 274 | 1.026 | 6.243 | 3.940 | 12.356 |
| KOTA JAMBI  JUMLAH | | 5.995 | 2.045 | 138 | 2.881 | 4.742 | 34.440 | 22.495 | 72.736 |

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

**Tabel 3**

Pencapaian peserta KB aktif

Per Kecamatan Dalam Kota Jambi

Bulan: Desember 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | MIX KONTRASEPSI | | | | | | | JUML  AH |
| IUD | MOW | MOP | KDM | IMPL | SKB | PKB |
| 1 | TELANAIPURA | 430 | 100 | 21 | 203 | 200 | 2.988 | 986 | 4.949 |
| 2 | JAMBI SELATAN | 388 | 133 | 8 | 328 | 215 | 2.996 | 1.671 | 5.747 |
| 3 | JAMBI TIMUR | 248 | 117 | 7 | 261 | 224 | 5.134 | 2.365 | 8.390 |
| 4 | PASAR JAMBI | 49 | 14 | 0 | 16 | 32 | 540 | 301 | 952 |
| 5 | PELAYANGAN | 37 | 11 | 4 | 77 | 42 | 1.100 | 507 | 1.780 |
| 6 | DANAU TELUK | 51 | 20 | 3 | 146 | 39 | 1.766 | 654 | 2.682 |
| 7 | KOTA BARU | 626 | 180 | 17 | 288 | 483 | 6.650 | 2.151 | 10.526 |
| 8 | JELUTUNG | 331 | 109 | 5 | 179 | 128 | 2.810 | 1.336 | 4.908 |
| 9 | ALAM BARAJO | 884 | 233 | 16 | 357 | 391 | 4.536 | 2.471 | 8.899 |
| 10 | DANAU SIPIN | 330 | 79 | 9 | 190 | 183 | 3.741 | 1.516 | 6.101 |
| 11 | PAAL MERAH | 431 | 161 | 17 | 317 | 374 | 5.794 | 3.141 | 10.265 |
| KOTA JAMBI  JUMLAH | | 3.805 | 1.157 | 107 | 2.364 | 2.311 | 38.055 | 17.099 | 65.199 |

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Berdasarkan dari 3 (tiga) tabel di atas terlihat bahwa pada Desember tahun 2020 terjadi penurunan peserta KB aktif sebanyak 7.537 peserta yang awalnya pada Desember tahun 2019 pserta kB aktif berjumlah 72.736 peserta menjadi 65.199 peserta pada Desember tahun 2020.

Berdasarkan data BKKBN angka pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi terus meningkat atau berada di atas rata-rata nasional yaitu 2,3 persen sementara di tingkat nasional sendiri hanya berada pada 2.0 persen. Dan dalam data kependudukan di Kota Jambi merupakan barometer pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Jambi pada tahun 2011 sampai dengan 2018 rata-rata kenaikan penduduk sebesar 8.952 jiwa jumlah penduduk Kota Jambi meningkat setiap tahunnya. Serta melihat dari tiga tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan jumlah peserta KB aktif yang mana pada Desember tahun 2019 peserta KB aktif berjumlah 72.736 kemudian pada Desember 2020 menjadi 65.199 peserta KB aktif. Di kaitkan dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota jambi merupakan tugas dan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Jambi. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Jambi”.

1. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai dasar pengembangan bahasan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam upaya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di kota Jambi?
2. Apa saja kendala implementasi peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di kota Jambi?
3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut Bagaimana implementasi peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam upaya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di kota Jambi.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja kendala implementasi peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di kota Jambi.
3. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu hukum mengenai khususnya mengenai pengendalian penduduk.
3. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan apa saja faktor–faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengendalian penduduk di Kota Jambi.
4. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Jambi pada umumnya dan bagi para pihak yang melaksanakan pengendalian penduduk.

1. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, serta untuk mempermudah pembahasan masalah, sekaligus untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah–istilah, sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto:

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.[[10]](#footnote-10)

1. Dinas

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeah:

**Dinas** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1. Penduduk

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa:

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

1. Keluarga Berencana

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa:

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dari beberapa konsep di atas, maka judul skripsi yang penulis maksud adalah peran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Jambi.

1. Landasan Teori
2. Teori Kependudukan

Aliran Malthusian dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta yang hidup pada tahun 1798 hingga tahun 1834. Tulisan monumentalnya *An Essay on The Principle of Population as it Affect Future Improvemenet of Society, with remarkson the speculations of Mr. Godwin, Mr. Condorcet and other Writer atau lebih populer dengan sebutan Prinsip Kependudukan (The Principle of Population)* diterbitkan pertama kali pada tahun 1798.

Malthus mengemukakan bahwa penduduk bila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi. pembatasan penduduk dapat dilakukan dengan cara yaitu*, preventive checks.*

*Preventive checks*: yaitu pengurangan penduduk dengan penekanan jumlah kelahiran. *Preventive cheks* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Moral Restraint/*pengekangan diri: yaitu segala usaha untuk mengekang nafsu seksual.
2. *Vice/*pengurangan kelahiran: seperti penggunaan alat-alat kontrasepsi.[[11]](#footnote-11).
3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut C.S.T. Kansil adalah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.[[12]](#footnote-12)

Kali pertama di Indonedia diberlakukan sistem pemerintahan dengan sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Autos* yang berarti sendiri dan *namos* yang berarti aturan.[[13]](#footnote-13)

Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri.

1. Metodi Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, berikut ini penulis menguraikan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution adalah:

Penelitian ilmu hukum berupaya mengamati fakta–fakta hukum yang berlaku di tengah–tengah masyarakat, dimana hal pengetahuan untuk diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta–fakta sosial yang ada di hidup di tengah–tengah masyarakat sebagai budaya hidup di tengah masyarakat.[[14]](#footnote-14)

1. Spesifikasi Penelitian

Spefisikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang objek penelitian yang diteliti secara rinci yakni pelaksanaan pengendalian penduduk di kota Jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan.

1. Populasi dan Sampel Penelitian
2. Populasi

Penentuan populasi merupakan salah satu bagian dari tahap pelaksanaan penelitian ilmiah. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subyek atau obyek yang dikenal generalisasi hasil penelitian. Populasi menggambarkan bagaimana obyek penelitian yang kemudian untuk menentukan pengambilan sampel.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Jambi dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

1. Sampel Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel

Penentuan sampel respoden ini dilakukan dengan cara penarikan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling.*

Sebagaimana dikatakan Bahder Johan Nasution ;

*Purposive sampling* artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatan yang sama.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
3. Ketua Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
4. Ketua Bidang Pembinaan Keluarga Berencana
5. Sepuluh orang masyarakat Kota Jambi
6. Pengumpulan Data
   1. Studi Pustaka

Hal ini dilakukan dengan cara mencari literatur dan bahan hukum yang berkaitan apa yang diteliti.

* 1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab dengan lisan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Data
2. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari suatu penelitian dilapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat konkrit yang merupakan sebagai data primer yang sangat penting dal mendeskripsikan masalah.

1. Data Sekunder

Data yang didapat dari mempelajari yang berkaitan dengan permaslahan yang diangkat penulis. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari berbagi peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti:

1. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.
6. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ilmuwan, ahli, sarjana dan internet yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi ini.

1. Analisi Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data dianalisis secara deskriptif Analisis artinya, data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dan diolah secara sistematis, kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan kenyataan tentang Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Jambi.

1. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil, antara lain:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumuasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Peneltian dan Sistematika Penulisan

BAB II Pada bab ini merupakan Tinjauan Umum tentang Penduduk, Masalah Kependudukan, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk Kota Jambi. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III Pada bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang mengenai faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian penduduk di Kota Jambi dan bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam menyelesaikannya

BAB IV Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang diuraikan penulis dari bab- bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan Pelaksanaan pelaksanaan pengendalian penduduk di Kota Jambi Berdasarka Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

1. Ranthy Pancasasti dan Enis Khaerunnisa, *Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependudukan Berwawasan Gender Pada Urban Area Di Kota Serang,* <https://jurna>- l.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/4231 diakses pada Rabu 19 Februari 2020 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Mubadjir Darwin, *Dampak Kependudukan Terhadap Pemukiman*, Jurnal UGM, 1991, <https://jurnal.ugm.ac.id>/populasi/article/view/10789 diakses pada Rabu 20 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. https://jambi.tribun- news.com/2017/10/17/angka-pertumbuhan-penduduk-diatas-rata-rata, diakses pada Rabu 20 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2019/02/25/828/penduduk-kota-jambi-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2018.html> diakses pada Rabu 20 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-7)
8. Siswanto Sunano, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal 121. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada. 2003. Hal 139. [↑](#footnote-ref-10)
11. <Http://repository.radenintan.ac.id/1139/BAB_II.pdf> diakses pada Minggu 6 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-11)
12. Dewi Mulyanti, *Kunstitusionalitas Pengujian Peraturan daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review*, Ejurnal, Volume 5, 2017, [Http://jurnal.unigal.aca.id/index.php/galuhjustisi/- article /238/241](Http://jurnal.unigal.aca.id/index.php/galuhjustisi/-%20article%20/238/241) diakses pada Minggu 6 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Http://<https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-arti-otonomi-daerah-beserta-tujuan-dan-dasar-hukumnya> diakses pada Selasa 8 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 159-160. [↑](#footnote-ref-15)